

Dinamika Industri Garam di Madura 1950-1975

Rahayu Hardita Dwi Widyanti, Ponco Setiyonugroho

Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Universitas Indraprasta PGRI

r.hardita90@gmail.com ponco.setiyonugroho@unindra.ac.id

ABSTRAK

Pulau Madura telah dikenal sejak lama sebagai Pulau penghasil garam. Industri garam di Madura diketahui mulai masuk pada abad ke-19. Di bawah kebijakan monopoli garam yang diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, kesejahteraan petani garam mengalami peningkatan. Pasca Indonesia merdeka, euforia kebebasan dan nasionalisme mewarnai hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Pulau Madura Sebagai sebuah Pulau yang diketahui cukup produktif pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, Madura menjadi salah satu Pulau yang diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia. Keberadaan Perusahaan Garam milik Pemerintah Kolonial Belanda menjadi salah satu penyebab utamanya. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Dinamika Industri Garam di Madura setelah Indonesia Merdeka tahun 1950-1975. Artikel ini memperlihatkan bahwa di bawah Pemerintah Indonesia, Industri Garam di Madura justru mengalami penurunan.

Kata Kunci : Garam, Madura, Jawatan Regie Garam, PT. Garam, Nasionalisasi Aset Negara

ABSTRACT

Madura Island has been known for a long time as a salt-producing island. The salt industry in Madura is known to have started in the 19th century. Under the salt monopoly policy imposed by the Dutch Colonial Government, the welfare of salt farmers has increased. After Indonesia's independence, the euphoria of freedom and nationalism colored almost all regions in Indonesia, including Madura Island. As an island that was known to be quite productive during the Dutch Colonial Government, Madura became one of the islands that the Government of Indonesia fought for. The existence of a Salt Company owned by the Dutch Colonial Government was one of the main causes. The purpose of this study was to determine the dynamics of the salt industry in Madura after Indonesia's independence in 1950-1975. This Article show that under the Indonesian government, the salt industry in Madura actually experienced a decline.

Keywords: Salt, Madura, Jawatan Regie Garam , PT. Garam, Nationalization of State Assets

PENDAHULUAN



Gambar 1 Peta Asia Tenggara dengan batas Wilayah

Anthony Reid menjuluki wilayah Asia Tenggara dengan Negeri di Bawah Angin. Hal ini disebabkan oleh kondisi musim dan iklim negara-negara di Asia Tenggara dipengaruhi oleh keberadaan angin musim. Sampai kepada awal abad ke-19, kehidupan perekonomian negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada sektor perdagangan ini banyak dipengaruhi oleh eberadaan angin musim yang menggerakkan pelayaran. Seperti terlihat pada gambar disamping, wilayah Indonesia merupakan wilayah yang begitu strategis, tidak hanya beruntung dengan iklim tropis, Indonesia terletak di antara dua Samudera (Pasifik dan Hindia) dan dua Benua (Asia dan Australia).

Letak Indonesia yang strategis menyebabkan pelabuhan-pelabuhan Indonesia berkembang pesat sebagai pusat-pusat perdagangan. Sedangkan Iklim Tropis menjadikan hutan Indonesia menghasilkan buah-buahan, sayur-mayur dan binatang-binatang eksotis yang tidak ditemukan di daerah lain di Asia Tenggara. Iklim Tropis Indonesia juga menjadikan laut Indonesia lebih hangat dan cenderung jauh dari badai, sehingga hasil laut Indonesia melimpah. Dalam catatan perjalanannya, Marcopolo mengungkapkan kekagumannya atas

melimpahnya ikan di wilayah nusantara (Anthony Rheid, 2014:34).

Hasil laut Indonesia tidak hanya ikan, tapi juga kerang, mutiara dan teripang yang sampai saat ini masih menjadi primadona dunia. sebagai negara kepulauan, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Badan Informasi Geospasial (BIG) menyebutkan bahwa panjang garis pantai Indonesia mencapai 99.093km. Panjangnya garis pantai di Indonesia menjadikan Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara penghasil Garam terbesar di Dunia. Posisi Indonesia yang memiliki sinar matahari yang cukup juga menjadi salah satu faktor unggul yang mendukung tumbuh dan berkembangnya Indonesia menjadi negara penghasil garam terbesar di Dunia.

Loarca dalam Anthony Rheid (2014:33) menjelaskan bahwa ada semacam hubungan timbal balik dan saling bergantung yang terjadi antara masyarakat pesisir dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. Masyarakat di pegunungan membutuhkan ikan, garam dan makanan lainnya, begitu pun masyarakat pesisir, mereka tidak dapat hidup tanpa beras atau nasi. Kehidupan saling bergantung ini membuka peluang usaha perdagangan garam di wilayah Asia tenggara. Industri garam ini berkembang beriringan dengan majunya usaha penangkapan ikan di sepanjang pantai laut jawa. Ikan dikenal sebagai salah satu makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Asia Tenggara. Kebutuhan yang tinggi akan daging ikan membuat masyarakat di Asia Tenggara tidak mampu menerima ketidaktersediaan ikan segar akibat perubahan musim. Untuk mengatasi hal ini, garam menjadi satu solusi. Kebutuhan akan ikan segar kemudian dijawab dengan munculnya ikan asin sebagai satu komoditas perdagangan baru di Asia Tenggara. Melimpahnya Garam di Indonesia di catat oleh Anthony Reid (2014: 33) sebagai

salah satu hal yang menjadikan rakyat yang tinggal di pesisir menjadi hidup makmur. Kondisi alam yang seolah mendukung industri garam, ditambah kebutuhan garam sebagai bumbu utama dalam setiap masakan di Asia Tenggara, menjadikan Garam bernilai cukup tinggi pada masa itu.



Gambar 2. Peta Madura dengan Batas-batas Wilayahnya

“Dari Jaratan, Gresik, Pati, Juwana, dan tempat-tempat sekitarnya, mereka membawa garam yang mutunya baik. Orang biasanya membeli 800 gantang seharga 150.000 perak, dan menjualnya ke Banten seharga 1.000 perak per 3 gantang.”

Kebutuhan akan ikan Asin juga turut mempengaruhi permintaan atas garam. Meningkatnya minat masyarakat di Asia Tenggara terhadap ikan asin turut mempengaruhi majunya kehidupan para petani garam di Nusantara. Selain dianggap sebagai makanan yang cukup praktis, ikan Asin dikenal memiliki aroma yang cukup kuat dan mampu menambah nafsu makan. Beberapa nelayan menjadikan ikan asin sebagai bekal dalam perjalanan melaut.

Salah satu Pulau yang telah dikenal lama sebagai penghasil garam adalah Pulau Jawa. Sebagai salah satu pulau terbesar di Asia Tenggara, menjadikan Pulau Jawa dikenal sebagai pulau yang juga memiliki garis pantai yang cukup Panjang. Hal ini kemudian menjadikan Pulau Jawa terutama Jawa Timur menjadi salah satu daerah penghasil garam

terbesar di Asia. Salah satu pulau yang kemudian dikenal sebagai pulau garam adalah pulau Madura, karena di pulau ini lah awal mula VOC dan pemerintah kolonial mengembangkan apa yang mereka sebut modernisasi industri garam.

Jika melihat gambar di atas, penunjukan Madura sebagai pusat penghasil garam memang tepat. Melihat secara geografis pulau Madura dikelilingi laut serta lahan sekitar laut tersebut tidak padat penduduk, sehingga potensi pembukaan lahan untuk pembuatan tambak garam sangat memungkinkan. Sinar matahari yang melimpah menjadikan Madura sebagai salah satu daerah beriklim panas di Indonesia. Hal ini menjadikan hampir semua kabupaten di Madura berpotensi sebagai tambak garam.

Secara administratif wilayah Madura merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur. Secara umum, wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Jawa Timur daratan dan Pulau Madura. Daerah Madura terletak antara koordinat 113 32' 54' BT – 116 16' 48' BT dan diantara 4 55' LS – 7 24LS dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Flores dan Jawa
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura
4. Sebelah barat berbatasan dengan Surabaya

De Jonge (2011 :2) menjelaskan bahwa dengan berbagai potensi yang ada, Madura telah lama tumbuh menjadi sebuah daerah dengan catatan panjang sebagai kota penghasil garam terbesar di masa Pemerintahan Kolonial. Hal ini lah yang menarik minat penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana dinamika kehidupan Industri Garam pasca kebijakan Nasionalisasi Aset Kolonial Belanda di tahun 1950 hingga munculnya kebijakan modernisasi industri garam di tahun 1975. Pengambilan periode

1950 sampai 1975 diambil penulis sebagai salah satu pembatasan tahun dengan melihat upaya pertama Pemerintah Indonesia dalam menasionalisasikan aset Kolonial Belanda yang berupa industri garam di Madura pada tahun 1950, sedangkan tahun 1975 diambil oleh penulis sebagai Batasan akhir penelitian dengan merujuk kepada modernisasi industri garam oleh pemerintah yang ditandai dengan pengalihan kelola lahan garam milik petani kepada PT. Garam yang diharapkan membawa kemajuan dalam perkembangan usaha garam di tanah Madura.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode sejarah, yang menurut Kuntowijoyo (2013 :69-80) merupakan langkah penting dalam menciptakan tulisan sejarah yang objektif. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut :

1. Pemilihan Topik. Pemilihan Topik merupakan tahap paling awal dalam penelitian Sejarah. Menurut Kuntowijoyo, pemilihan topik harus didasari oleh dua hal; yang pertama kedekatan emosional, yang kedua kedekatan Intelektual.
2. Heuristik yaitu pengumpulan sumber. Pada tahapan ini, penulis mengumpulkan segala sumber yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.
3. Verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi merupakan kritik yang dilakukan oleh penulis terhadap sumber baik dari material maupun isinya guna menguji kredibilitas sumber.
4. Interpretasi yang berarti tafsiran terhadap data atau sumber. Dalam tahap ini penulis mulai membangun analisa dari data atau sumber yang telah didapatkan.
5. Historiografi. Historiografi merupakan tahapan terakhir dalam penulisan sejarah. Pada tahap ini, penulis sudah dapat menyelesaikan potongan puzzle peristiwa

masa lalu dan membangunnya menjadi sebuah narasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Industri Garam dan Kehidupan Petani Garam di Sumenep, Madura Pasca Indonesia Merdeka 1957-1975

A. Industri Garam di Madura Pada Masa Kolonial 1920-1940

Garam telah dikenal oleh dunia jauh sebelum abad ke-15. Di Indonesia para nelayan telah terbiasa menggunakan garam untuk mengawetkan ikan hasil tangkapannya. Ikan hasil pengawetan tersebut tidak hanya diperjual-belikan saja, tapi juga dijadikan perbekalan selama pergi berdagang antar pulau. *De Jonge* (2011 :7) mencatat bahwa ada sebuah pulau yang terletak di bagian utara pulau Jawa yang dikenal sebagai Pulau Garam. Pulau Garam atau Pulau Madura dikenal sebagai tempat penghasil garam sejak akhir abad ke-19 sampai abad ke-20, atau sejak VOC mulai berkuasa di Madura. Kehadiran VOC di Madura diawali dengan konflik yang terjadi antara Trunojoyo yang merupakan keturunan Adipati Madura dengan penguasa Mataram di tahun 1670. Keinginan Trunojoyo untuk lepas dari cengkaman Mataram membuatnya berupaya membujuk VOC untuk dapat membantu Madura terutama Sumenep dan Pamekasan untuk dapat lepas dari hegemoni Mataram.

Konflik yang terjadi antara Trunojoyo dengan Mataram Islam dimanfaatkan sebagai senjata oleh VOC untuk mengurangi kekuasaan Mataram di tanah Jawa. Bantuan yang diberikan oleh VOC kepada Trunojoyo mengakibatkan Mataram kehilangan kekuasaannya di pantai utara Jawa. Meskipun tanah Madura dianggap kurang menguntungkan bagi pertanian, namun potensi sebagai penghasil garam sudah terlihat di

sepanjang pantai Madura yang dipenuhi tambak-tambak garam. Dalam buku *Garam, Kekerasan Dan Aduan Sapi*, De Jonge mencatat bahwa hubungan antara VOC dengan Adipati Sumenep ini ditandai dengan pengiriman Upeti yang berupa hasil bumi kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Hasil bumi ini seringkali berupa ikan laut, garam dan Asam jawa.

Pemusatan industri garam di Madura, dicatat oleh De Jonge (2011 :34) dalam esainya yang berjudul *Monopoli dan Perlawanan*, bermula sejak tahun 1870. Sejak saat itu, Pemerintah Kolonial mulai banyak mengirimkan pegawai-pegawai berdaarah Eropa ke Madura untuk mengawasi jalannya Industri garam di Madura. Tidak hanya memonopoli perdagangan garam, tapi Belanda kemudian juga memonopoli produksi agar harga garam tidak turun di pasaran.

MC. Ricklefs (2008 :202) menjelaskan dalam bukunya, bahwa dalam Industri garam tradisional, proses pembuatan garam mengandalkan sinar matahari, dan kondisi Sumenep yang panas mendukung ekstraksi air laut menjadi garam. Tercatat sampai pada awal abad ke-20, Pulau Madura merupakan pemasok utama garam ke seluruh wilayah Hindia Belanda. Namun untuk dapat sampai ke Batavia yang menjadi pusat perdagangan, garam dari sumenep ini harus dikirim ke Surabaya. Metode sederhana dalam pembuatan garam juga dijelaskan oleh Crawford dalam Lombard (2008: 98), bahwa ada kemiripan antara produksi garam di pantai utara Jawa dengan Pulau Luzon.

Keuntungan yang dihasilkan dari penjualan garam yang diproduksi di Madura menyebabkan dibukanya Industri garam secara besar-besaran di Pulau Madura oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Untuk meningkatkan keuntungan yang lebih besar, Pemerintah Kolonial Belanda kemudian melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan industri garam di Madura.

Pemberlakuan sistem monopoli dalam perdagangan garam menjadikan Pemerintah Kolonial bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi dan distribusi garam.

Menurut Imam Syafi'I (2021:58), dalam kurun waktu selama sepuluh tahun, pengambil alihan lahan garam milik rakyat menjadi milik pemerintah disahkan dengan pendirian *Djawatan Regie* Garam pada tahun 1921. Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam *Staadblad van Nederlandsch Indie* No. 73 tahun 1882 ayat 1, beberapa daerah yang memiliki ladang garam berkewajiban membuat garam untuk keperluan pemerintah. pemilik ladang dibebaskan dalam membuat garam, boleh dilakukan di ladang miliknya sendiri atau di di ladang milik pemerintah. berkaitan dengan proses produksi, *Djawatan Regie Tjandu dan Garam* bertugas untuk mengontrol kualitas garam.

Garam menjadi salah satu komoditi yang banyak memberikan keuntungan pada Pemerintah Kolonial. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kolonial Belanda untuk melakukan modernisasi pada sistem produksi garam di Madura. Upaya Pemerintah Kolonial dalam meningkatkan produksi garam di Madura berhasil meningkatkan keuntungan. Berdasarkan data yang dicatat oleh Kuntowijoyo (2017 :421-423), di bawah pengawasan *Djawatan Regie Tjandu dan Garam*, kenaikan produksi garam yang sbelumnya hanya menghasilkan f140 untuk 20 koyang garam, menjadi f155 sampai f233. Hal ini turut berdampak pada kesejahteraan petani garam.

Pasca Malaise yang menyerang dunia di tahun 1930, Pemerintah Kolonial mulai mereorganisasi proses pembuatan garam. Pemerintah juga kemudian membeli seluruh tambak garam milik swasta pada tahun 1936. Namun usaha industri garam ini harus terhenti di tahun 1940 seiring intensitas peperangan antara sekutu dengan Jepang.

B. Dinamika Industri Garam di Indonesia Pasca Indonesia Merdeka 1950-1975

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta mengubah kondisi Hindia Belanda, tidak hanya status Politik, tapi juga sosial dan ekonomi. Perusahaan Garam yang sebelumnya merupakan milik Pemerintah Kolonial Belanda, beralih ke tangan Pemerintah Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Oktober 1945 Nomor 749, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1945, Moekarto Notowidigjo diangkat sebagai kepala Djawatan Regie Tjandu dan Garam Pusat. Berdasarkan surat keputusan tersebut, dimulai lah upaya nasionalisasi Perusahaan Garam Oleh Indonesia.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam menasionalisasikan Perusahaan Garam melahirkan polemik baru. Madura bukan hanya pulau yang produktif tetapi juga merupakan benteng terdekat dengan Jawa Timur bagi Belanda. Situasi politik yang tidak menentu ikut mempengaruhi Perusahaan Garam di Madura. Proses nasionalisasi Perusahaan Garam di Madura secara resmi ditandai dengan Penandatanganan dan Pengalihan Perusahaan Garam Madura milik asing kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak tahun 1950, Djawatan Regie Garam dan Tjandu berganti nama menjadi Djawatan Regie Garam. Hal ini berdampak pada berkurangnya modal yang diberikan oleh Pemerintah Belanda. Namun, dengan berkurangnya dominasi modal Belanda di Perusahaan Garam Madura, berkurang pula dominasi Belanda di Indonesia. (Ratna Cahyaningsih, 2019 :317-330).

Nasionalisasi Perusahaan Garam beriringan dengan modernisasi pada sistem produksi garam. Hal ini mengakibatkan peningkatan hasil produksi garam sebanyak 18%. Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis, pada tahun 1950, Perusahaan Garam

mampu menghasilkan 21.194,056 Ton Garam, pada tahun berikutnya terjadi peningkatan hasil produksi, sebesar 32.558,240 Ton Garam. Namun, tahun 1952, produksi garam kembali mengalami penurunan. Penurunan hasil produksi garam, menyebabkan Pemerintah Indpnesia lebih serius dalam mengembangkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi aset Asing (Imam Syafi'I, 2013 :85-104).

Salah satu langkah serius yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah mengeluarkan undang-undang No.44 tahun 1952 yang berisi terbentuknya Perusahaan Garam dan Soda Nasional (PGSN) dan menetapkannya sebagai Perusahaan Milik Pemerintah. dengan berdirinya PGSN, berakhir pula Perusahaan Garam di Madura yang bernama Djawatan Regie Garam dan Tjandu. Sejak diberlakukannya undang-undang no.44 tersebut, Menteri Keuangan Sumitro Djoyohadikusumo mengeluarkan keputusan terkait penyelenggaraan penggaraman, bahwa setiap pengusaha wajib melaporkan luas lahan garam yang dimiliki kepada Kabupaten setempat.

Proses Nasionalisasi aset-aset kolonial tidak selalu berjalan lancar. Kemerdekaan Indonesia seolah memberikan harapan kepada para Petani Garam, bahwa tanah dan lahan garam yang selama ini mereka sewakan dengan sistem kontrak akan dikembalikan. Tidak hanya petani garam, euforia kemenangan ini juga mewarnai kaum buruh di pabrik dan perkebunan-perkebunan di Indonesia. hal ini memicu ketegangan antara pemilik perusaan dengan buruhnya. Ricklefs mencatat bahwa sepanjang bulan November hingga Desember, terjadi mogok masal para buruh hingga perebutan aset-aset pabrik. Demi menghindari kerusakan yang akan menelan banyak korban, Perdana Menteri Juanda membuat keputusan yang diumumkan oleh pers-pers yang ada di Indonesia pada tanggal 10 esember 1957, bahwa semua perusahaan

milik Belanda berada di bawah pengawasan Pemerintah Indonesia.

Pada tanggal 13 Desember 1957, Nasution menginstruksikan untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda yang selama ini telah diambil alih buruh (MC. Ricklefs, 1998 :394-395). Bersamaan dengan kebijakan nasionalisasi aset-aset kolonial pada tahun 1957, dikeluarkan pula kebijakan penghapusan monopoli produksi garam yang telah berlaku sejak tahun 1920.

Kebijakan Pemerintah untuk mengambil alih pabrik dan perkebunan tidak berhasil meredakan ketegangan yang terjadi. Hal yang terjadi justru sebaliknya, kebijakan pemerintah menimbulkan kekecewaan di pihak buruh, dalam kasus ini adalah petani garam. Pemerintahan Indonesia yang baru saja terbentuk membutuhkan dana untuk menjalankan sebuah negara, dan industri garam menjadi salah satu yang dilihat pemerintah memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Melalui kebijakan nasionalisasi aset asing tahun 1957, Pemerintah Indonesia berharap untuk dapat memonopoli usaha garam di pantai utara pulau Jawa terutama Madura.

Berdasarkan kebijakan Nasionalisasi Aset-aset Kolonial, Pemerintah Indonesia menyita tambak garam di Madura pada tahun 1957. Pemerintah kemudian membentuk Perum Garam yang mengatur jalannya usaha tambak garam di Madura, namun upaya ini tidak berjalan baik. Buruknya manajemen dalam perum garam, akhirnya memaksa Perum Garam menyerahkan lahan garam kepada masyarakat sekitar dengan sistem pengelolaan bagi hasil.

Ketidakmampuan petani lokal di Madura, dalam memenuhi kebutuhan garam di Indonesia, mendorong Pemerintah untuk kembali merancang pengalihan usaha produksi garam dari petani lokal menjadi milik Badan Usaha Milik Negara yang dikenal sebagai PT.Garam. PT. Garam adalah perusahaan

Garam hasil nasionalisasi milik pemerintah Kolonial Belanda yang sebelumnya beroperasi di Sumenep, Madura. Pemerintah Indonesia berharap dengan didirikannya PT. Garam, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan garam nasional, tetapi juga mampu menjadi negara pengekspor garam. Namun PT Garam yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pengawasan produksi garam dan distribusi garam ke seluruh wilayah Indonesia terjangkit korupsi, sehingga upaya memajukan usaha garam malah memperburuk industri garam sendiri.

Melihat kondisi tersebut, di tahun 1970, Pemerintah kembali berupaya mereorganisasi Perum Garam dengan bantuan dari AZKO (Kementrian Pembangunan Belanda). Tujuan dari reorganisasi ini adalah memaksimalkan usaha produksi garam di kalianget. Demi mewujudkan upaya tersebut, pemerintah memperluas usaha tambak garam milik pemerintah yang semula 3.250 hektar, harus dimekarkan seluas 1.000 hektar lagi (De Jonge, 2011 :37). Upaya Pemerintah melahirkan protes dari para Petani Garam Kebijakan Pemerintah yang menasionalisasikan tambak garam milik para Petani Garam dianggap sebagai perampasan paksa lahan atau tambak milik rakyat.

Kondisi produksi PT. Garam yang terus menurun menekan Pemerintah untuk mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu modernisasi Industri Garam pada tahun 1975. Hal ini berarti, Pemerintah harus membebaskan lebih banyak lahan sepanjang tahun 1975-1976. Keputusan ini menyebabkan kehidupan petani garam terasa terancam. Pemerintah dilaporkan banyak melakukan tindakan intimidasi kepada petani garam yang melakukan protes dengan cara menuduh mereka sebagai eks anggota PKI. Dalam rangka melancarkan proyek modernisasi industri garam, PT. Garam mendapatkan bantuan dari pemerintah Belanda sebesar US\$

18.124.000 (Novi Aristin Yulinda dkk , 2014 :69-77)

Pada tahun 1975, tanah pegaraman yang dibebaskan oleh PT. Garam di kabupaten Sumenep kurang lebih 1.184,92 ha. Berubahnya status petani garam dari pemilik lahan menjadi buruh akibat dari proyek modernisasi PT. Garam ini menimbulkan konflik tersendiri. Penolakan pembebasan lahan yang dilakukan oleh para petani garam berawal dari tidak adanya kesepakatan mengenai uang ganti rugi antara pemilik lahan dengan PT. Garam. Sampai pada 1977, PT. Garam berhasil memperluas lahan garam seluas 4.000 hektar dengan biaya ganti sebesar Rp.100 per meter (Novi Aristin Yulinda dkk , 2014 :69-77). Kehidupan para petani garam kemudian kembali menjadi buruh setelah sebelumnya sempat merasakan sebagai pemilik lahan. Tercatat dalam website yang sama, bahwa upah buruh Industri Garam berkisar Rp. 25.000-Rp.26.000 per hari.

C. Dampak Kebijakan Industri Garam 1957-1975.

Tinggal di daerah yang memiliki tanah yang tidak subur menjadikan masyarakat yang tinggal di Pulau Madura tumbuh sebagai petani garam dan nelayan, hal tersebut didukung oleh posisi Pulau Madura yang memang dikelilingi oleh lautan. Kebijakan pemerintah turut berpengaruh terhadap dinamika kehidupan sosial-ekonomi petani garam di Madura. Sebagai Pulau penghasil garam terbesar di Indonesia, potensi Madura ini kemudian selalu berada di posisi dimana para penduduknya selalu merasakan sulitnya hidup ditengah penjangkahan, baik pada masa kolonial, maupun pada masa Pemerintahan republic sendiri.

Aksi Protes atas kebijakan garam sudah dimulai sejak tahun 1917, dimana pemerintah kolonial membuat kebijakan untuk membeli semua lahan petani garam pribumi untuk memaksimalkan usaha produksi dan monopoli garam di Hindia Belanda. Monopoli

garam yang digaungkan oleh pemerintah kolonial Belanda membuat kaum nasionalis (Syarikat Islam) meradang dan membangkitkan kesadaran para petani garam untuk melawan (Kuntowijoyo, 2017 :434-436). Namun perlawanan yang dilakukan oleh petani garam bukan lah bentuk perlawanan yang konfrontatif dengan pemerintah kolonial. mereka memilih jalan dengan penyelundupan garam-garam dari Madura atau dengan kata lain melakukan praktik perdagangan naram ilegal yang jelas merugikan pemerintah kolonial Belanda.

Memasuki masa kemerdekaan, perlawanan para petani garam semakin tidak berani konfrontatif. Munculnya PT. Garam di tahun 1960-an sebagai upaya monopoli garam oleh pemerintah ditanggapi pasif oleh para Petani garam di Madura. Berada di posisi yang paling lemah mendorong mereka melakukan perlawanan atas kebijakan monopoli garam dengan dua cara, cara pertama dan lazim mereka lakukan adalah dengan menurunkan kualitas garam. Cara yang menurut penulis cenderung menjadi *boomerang* bagi kehidupan mereka.

Upaya Pemerintah dalam memonopoli industri garam melahirkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Madura. Sebagian masyarakat Madura merasa dirugikan dengan kebijakan nasionalisasi tambak garam yang mereka kelola selama ini. Memasuki sepuluh tahun terakhir sejak 1957, usaha garam dengan sistem bagi hasil mengalami kemerosotan. Perubahan cuaca yang tidak menentu dianggap penulis turut andil dalam kegagalan panen produksi garam. Kemerosotan produksi garam berdampak kepada langkanya garam di Indonesia.

Buruknya kualitas garam lokal menjadi satu alasan jatuhnya harga garam Indonesia di pasaran Internasional, bahkan membuka peluang bagi importir garam untuk masuk ke Indonesia, dengan alasan kualitas garam yang dihasilkan oleh petani garam di Indonesia tidak

memenuhi syarat garam yang bergizi, terlebih setelah munculnya kampanye standarisasi garam beryodium yang digaungkan oleh AZKO, maka nilai garam Indonesia semakin turun. Dampak Panjang dari perilaku ini adalah gulung tikarnya perusahaan garam yang membuat petani garam kehilangan pekerjaannya. Namun mereka melihat dengan cara yang berbeda, dimana jika kualitas garam meningkat, maka yang diuntungkan adalah pemilik lahan atau industri garam.

Memasuki tahun 1975, Petani Garam yang merasa dirugikan oleh PT. Garam mulai banyak melakukan protes penolakan pembebasan lahan. Namun aksi protes mereka segera diredam oleh Pemerintah. Pemerintah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi. Namun Petani Garam menganggap kegiatan sosialisasi tidak lebih dari kegiatan-kegiatan yang bersifat intimidatif.

Konflik yang terjadi antara Petani Garam dengan PT. Garam kian memanas. Isu mengenai penutupan Teluk Gresik Putih dan Sungai Saroka menjadi isu yang mewarnai kegiatan-kegiatan sosialisasi yang memanas di sepanjang tahun 1975. Aksi-aksi demonstrasi menolak modernisasi juga berlangsung sepanjang tahun. (Novi Aristin Yulinda dkk, 2014 :69-77).

Aksi Protes para Petani Garam mulai mereda ketika para Petani Garam tidak melihat hasil yang signifikan dari aksi-aksi tersebut. Para Petani garam kemudian menemukan cara baru untuk menunjukkan protes dan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan modernisasi yang dilakukan oleh PT. Garam. Kegiatan *ngoret* menjadi alternatif baru yang diciptakan oleh para Petani Garam dalam memprotes kebijakan PT. Garam. Pada komunitas petani garam terdapat kebiasaan mengambil sisa-sisa hasil panen garam di ladang yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan biasanya dilakukan oleh perempuan dan anak-anak.

Kegiatan untuk mengambil sisa-sisa hasil panen garam di lading garam itu dalam tulisan ini disebut dengan istilah *aksi ngoret*. *Aksi ngoret* (di beberapa daerah dengan nama lain) di ladang garam adalah fenomena umum yang dapat ditemukan pada komunitas petambak garam di Indonesia khususnya di Jawa (Yetty Rochwulaningsih, 2016 :121-132). Sekilas aksi itu tampak semata-mata hanya sekedar untuk mendapatkan hasil dengan mengais sisa-sisa garam yang tercecer di lahan setelah dipanen. Namun penulis melihat ini sebagai salah satu bentuk perlawanan dari para petani garam. Kegiatan *ngoret* ini sebenarnya bisa masuk kategori pencurian.

Aksi *ngoret* yang umum dilakukan oleh kaum wanita di Madura ini biasanya ramai ketika musim panen mulai tiba. Kaum wanita berduyun-duyun membawa serokan dan karung yang akan digunakan untuk mengumpulkan garam hasil *ngoret*, menuju tambak-tambak garam. Setelah garam-garam selesai dipanen, kaum wanita dan anak-anak mulai memasuki lahan dan memunguti ceceran garam yang terjatuh dan tersisa di lahan. Setelah dirasa cukup, kaum wanita kemudian menemui para pengepul ilegal yang muncul selama musim panen tiba. Garam hasil *ngoret* ini kemudian dibeli dengan harga yang relative rendah, karena menurut pengepul garam ini dibawah kualitas garam standar, penulis melihat ini sebagai akal-akalan dari pengepul saja, agar dapat garam ilegal dengan harga yang jauh lebih murah. Posisi petani garam yang serba sulit, membuat mereka tidak berani bersikap konfrontatif dengan pemilik lahan dan melakukan perlawanan dengan cara terselubung.

Kehidupan perekonomian para petani garam yang senantiasa hidup dalam catatan Panjang monopoli garam, membuat mereka tumbuh dalam kemiskinan. Mereka selalu ditempatkan dalam satu kondisi yang lemah, dimana tindak ketidakadilan dari pemilik

lahan selalu terjadi, namun mereka tidak mampu melawan secara konfrontatif, dikarenakan kebutuhan akan pekerjaan itu sendiri. Salah satu tindak ketidakadilan dari para pemilik lahan adalah dengan memberlakukan aturan pemotongan komisi atau upah harian mereka jika garam mengalami penurunan produksi atau penurunan kualitas garam. Tidak tanggung-tanggung, pemilik lahan akan memotong 10-30% dari penghasilan buruhnya. (Yetty Rochwulaningsih, 2016 :121-132).

Permasalahan kemiskinan ini menurut penulis berakar sudah sejak awal kebijakan monopoli garam ditetapkan oleh pemerintah sejak didirikannya PT. Garam, dimana pemerintah membeli lahan garam milik petani garam dengan harga yang begitu rendah dan menjadikan sebagian besar masyarakatnya menjadi buruh di pabrik-pabrik garam. Kemiskinan di Sumenep Madura juga tidak dapat lepas dari kaitannya dengan Pendidikan, dimana anak-anak yang tinggal di sekitar tambak garam akan memilih mengoret daripada pergi ke sekolah bila musim panen garam tiba. Ketidakmapanan ekonomi dan Pendidikan menjadikan desa-desa penghasil garam ini sulit untuk mengejar kemajuan. Hal ini lah yang menyebabkan Industri Garam di Indonesia tidak mengalami peningkatan, meskipun didukung oleh potensi alam Indonesia.

KESIMPULAN

Kondisi Alam yang tidak mendukung Pulau Madura sebagai lahan pertanian ternyata memiliki potensi lain, yaitu sebagai pulau penghasil garam. Industri garam di Indonesia diketahui sudah ada sebelum abad ke-15, namun ditetapkannya Madura sebagai pusat penghasil garam baru pada tahun 1870. Ditandai dengan dibelinya lahan garam yang dimiliki oleh pribumi dan swasta di Madura.

Industri garam mulai meningkat sejak tahun 1921, sejak didirikannya perusahaan

garam resmi milik pemerintah kolonial Belanda yang ketika Indonesia merdeka, berbagai upaya nasionalisasi aset-aset milik Pemerintah Kolonial Belanda. Pada awal proses nasionalisasi, Indonesia masih mendapatkan keuntungan besar dari produksi garam di Madura. Penghapusan kebijakan penghapusan monopoli garam pada tahun 1957 menjadi titik awal harapan perubahan kesejahteraan hidup Petani Garam. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sejak tahun 1957 hingga memasuki tahun 1975 hasil produksi garam Indonesia mengalami penurunan.

Berbagai upaya memajukan produksi garam dilakukan oleh Pemerintah melalui PT. Garam, namun angka korupsi yang tinggi dalam tubuh PT. Garam dan rendahnya kepercayaan Petani Garam terhadap PT. Garam menjadikan kebijakan modernisasi industri garam di tahun 1975 mendapatkan banyak perlawanan.

Melemahnya industri garam di Indonesia berpengaruh besar terhadap kehidupan petani garam. Petani Garam cenderung miskin. Kemiskinan mendorong mereka untuk menjual garam ilegal demi mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemiskinan juga mendorong anak-anak dari petani garam memilih pergi mengoret daripada pergi ke sekolah. Rendahnya kepedulian para Petani Garam terhadap Pendidikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mereka sulit beradaptasi dengan kemajuan zaman. Selain korupsi yang tinggi, ketidakmampuan Petani Garam dalam memahami konsep modernisasi yang diajukan oleh PT. Garam juga menjadi faktor yang menyebabkan semakin menurunnya angka produksi garam di setiap tahunnya.

Daftar Pustaka

- Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Dennys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya : Jaringan Asia Volume II*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Huub De Jonge, *Garam, Kekerasan Dan Aduan Sapi : Essai-essai Tentang Orang Madura dan Kebudayaan Madura*, Yogyakarta : PT. LKiS, 2011.
- Imam Syafi'I, *Persaingan Pengangkutan Garam di Selat Madura Tahun 1924-1957*, Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. XVII, No.1 Februari 2013 : 85-104.
- Imam Syafi'I, *Sejarah Garam Madura : Rivalitas Pengangkutan Garam Madura 1912-1981*, Jakarta : LIPI, 2021.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jogjakarta : Tiara Wacana, 2013.
- Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris : Madura 1850-1940*, Jogjakarta : IRCISoD, 2017.
- Mc. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Jogjakarta : Gadjah Mada University Press, 1998.
- Novi Aristin Yulinda dkk, *Konflik Lahan Pegaraman di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep tahun 1975-1976*, Jurnal Publika Budaya Volume 2 (1) Maret 2014. Hlm.69-77.
- Ratna Cahyaningsih, *Perkembangan Jawatan Regie Tjandu dan Garam Hingga Perusahaan Garam dan Soda Negeri (PGSN) di Madura Tahun 1945-1957*, Jurnal Prodi Ilmu Sejarah Vol.3 No. 3 Tahun 2019, hlm. 317-330.
- Yetty Rochwulaningsih, *Senjata Kaum Lemah : Perlawanan Sehari-hari Petambak Garam*, Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 121-132.

Internet

- <http://nationalgeographic.grid.id/read/13285616/terbaru-panjang-garis-pantai-indonesia-capai-99000-kilometer?page=all>, diakses pada tanggal 23 Desember 2018.
- <http://www.Delpher.nl>. Di akses Pada tanggal 22 Desember 2018
- <https://daimca.com/2018/04/25/sejarah-dimulainya-tambak-garam-di-Madura/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2018